

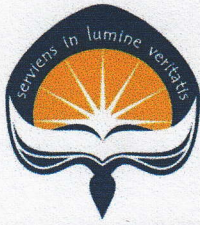
**TESIS**

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**BAMBANG**  
**No. Mhs.: 145202297/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
2016**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : BAMBANG

Nomor Mahasiswa : 145202297/PS/MIH

Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan

Judul Tesis : **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**Nama Pembimbing.**

**Tanggal**

**Tanda Tangan**

1. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

15/2/2016

2. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

17/2/2016



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

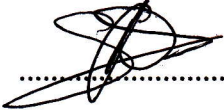


Nama : BAMBANG

Nomor Mahasiswa : 145202297/PS/MIH

Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan

Judul Tesis : **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 24 Februari  
Tahun 2016

<b>Dewan Penguji</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum	
2. Sekretaris	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum	
3. Anggota	Dr. Elisabet Sundari, S.H., M.Hum	

**Ketua Program Studi**  
  
Dr. Elisabet Sundari, S.H., M.Hum  
**PROGRAM  
PASCASARJANA**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang

No. Mhs : 145202297

Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Tesis dengan judul “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”, merupakan karya asli penulis dan bukan hasil plagiasi. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister Humaniora (M. Hum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.

Tesis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian dari penulis sendiri. Semua informasi yang ada dalam tesis ini dikutip dari karya ilmiah lain yang telah diberikan penghargaan. Kutipan yang dikutip oleh penulis dengan menyebutkan secara lengkap identitas pengarang, dan bukannya yang telah sesuai dengan standar penulisan yang baik dan benar. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan atau sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2016

Yang menyatakan,



Bambang

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat” dengan baik, penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa, tesis ini dapat diselesaikan karena berkat bantuan dari berbagai pihak yang dengan segala tenaganya mau meluangkan waktu dan kesempatan dalam proses pembelajaran, meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis. Bantuan dari berbagai pihak sangat berarti dalam merampungkan tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Perawan Maria yang selalu berkenan mendengarkan doa dan menguatkan penulis baik dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan lancar.
2. Jajaran Pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Parnama Putranto, MBA, selaku Direktur PascaSarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Elisabet Sundari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I, yang penuh dengan kerendahan hati, sabar dan tabah dalam membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama bimbingan sampai pada perampungan tesis ini.
4. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II, yang selalu sabar, tabah dan penuh kerendahan hati dalam membimbing serta mengoreksi tesis ini.
5. Seluruh Jajaran Kepustakaan: Perpustakaan Universitas Atma Jaya, Kepustakaan Daerah Yogyakarta, Kepustakaan Kota Yogyakarta, yang dengan sukarela melayani penulis dalam peminjaman buku-buku dan literatur tentang penulisan tesis ini.
6. Seluruh jajaran staf pengadministrasian PascaSarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang dengan tulus dan rendah hati melakukan pelayanan baik selama perkuliahan sampai pada penyelesaian tesis ini.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan strata 2.
8. Drs. Yohanes Ontot, M.Si, selaku Wakil Bupati Sanggau yang telah meluangkan waktu dalam kesempatan untuk wawancara menyelesaikan tesis ini.
9. A. L. Leysandri, S.H, selaku Sekretaris Daerah yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini.

10. Drs. Edy Sumantri, M.M, selaku Inspektur Kabupaten Sanggau yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian di Inspektorat Kabupaten Sanggau.
11. Drs. Gorgonius Theno, M.Si, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian di instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
12. Jacobus, S.H., M.H, selaku Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, yang meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan informasi mengenai hukum.
13. Dra. Saula Sriningsih, M.Si, selaku Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian yang bersedia diwawancarai untuk melengkapi data-data dalam penulisan tesis ini.
14. Sakina Dihara, S.H, selaku Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data tentang disiplin PNS, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Drs. Azahari, selaku Kasi Kemasyarakatan Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Sanggau, yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara untuk pengembangan tesis ini.
16. Ayah (almarhum), Ibu dan adik-adik tercinta yang telah memotivasi penulis baik dalam suka maupun duka sampai tesis ini rampung.

17. Istri Tercinta Merry Mardiani, S.E, ibu dari anak-anak yang saya cintai (Arnoldus Desta Louie Arya dan Brigita Anabel Vicky) yang senantiasa baik, tulus, penuh kasih sayang dan penuh rasa cinta dalam menyemangati penulis dalam berkarya dan menempuh pendidikan meskipun banyak rintangan dan cobaan.

18. Segenap teman-teman, dan rekan mahasiswa angkatan September 2014 dan secara khusus kepada angkatan Januari 2015, Muhamad Rusdi, S.H., M.Hum, dan Quido Benyamin Ngaji, S.H., M.Hum, Bayu Sulistomo, S.H yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa, tesis ini belum sempurna dan harapan, maka penulis sangat mengharapkan banyak masukan serta kritikan demi menyempurnakan tesis ini, semoga manfaat tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.



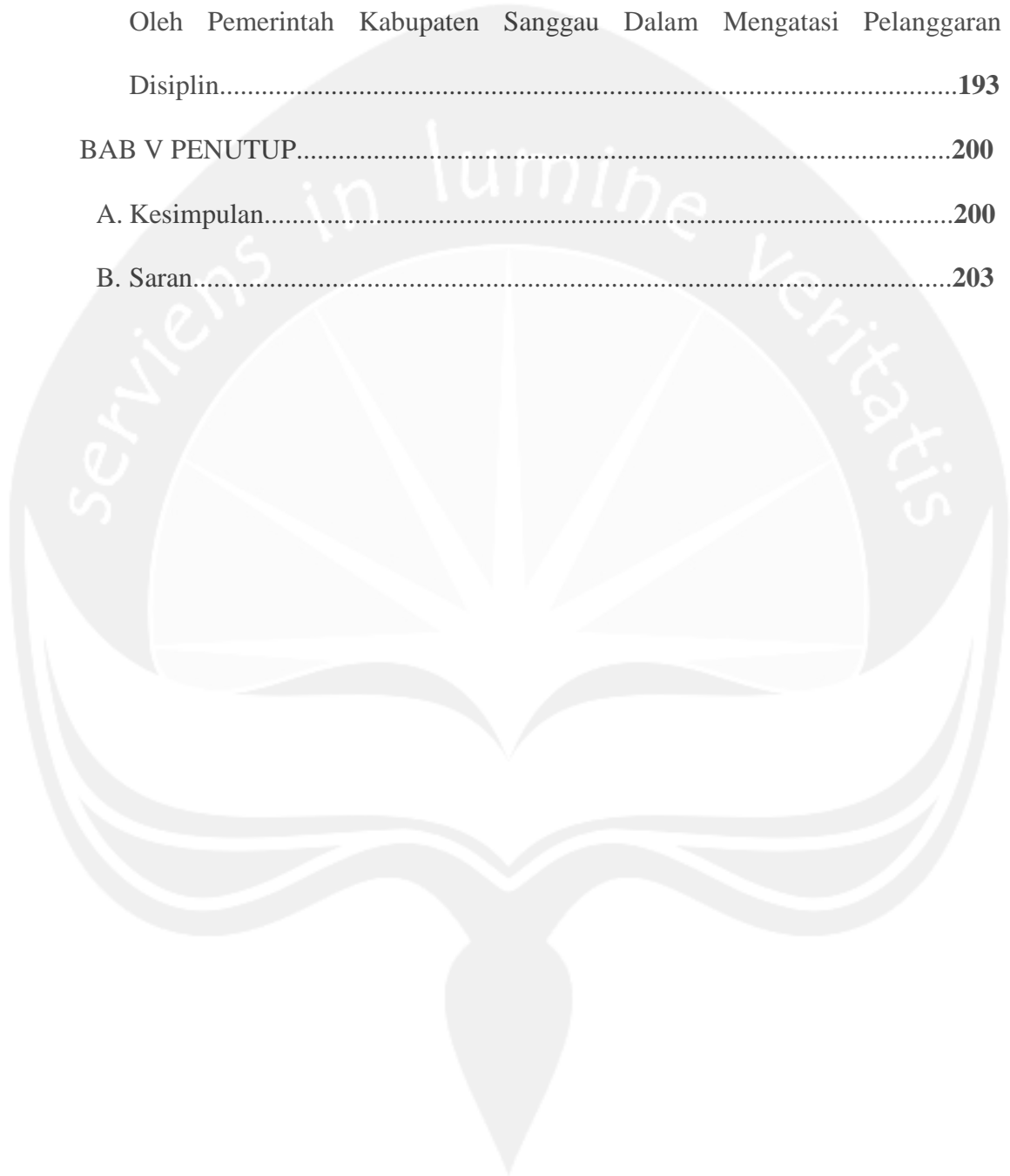
## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Batasan Masalah.....	26
D. Keaslian Penelitian.....	32
E. Manfaat Penelitian.....	38
F. Tujuan Penelitian.....	39
G. Sistematika Penulisan.....	40
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
A. Tinjauan Sanksi Administratif.....	42
1. Penerapan Sanksi Administratif.....	42
2. Pegawai Negeri Sipil.....	54
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	54
b. Sejarah Awal Terbentuknya Korps Pegawai Negeri Sipil.....	58
c. Metamorfosis Yuridis Normatif Undang-Undang Kepegawaian di Indonesia.....	61
3. Pelanggaran Disiplin.....	66
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.....	71
B. Landasan Teori.....	88
1. Teori Kepegawaian.....	89
2. Teori Sanksi Administratif.....	92
3. Teori Pengawasan.....	95

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>98</b>
A. Jenis Penelitian.....	98
B. Pendekatan Penelitian.....	98
C. Sumber Data.....	100
1. Bahan Hukum Primer.....	100
2. Bahan Hukum Sekunder.....	102
D. Teknik Pengumpulan Data.....	102
1. Studi Kepustakaan.....	102
2. Wawancara.....	102
E. Metode Analisis.....	103
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>107</b>
A. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.....	107
1. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	107
2. Tingkatan Dan Jenis Hukuman Disiplin.....	108
3. Kriteria Dan Unsur Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	109
4. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil.....	113
5. Bagan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....	118

6. Tatacara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin.....	<b>120</b>
7. Proses Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Bersumber Dari Hasil Pengawasan Atasan Langsung/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	<b>123</b>
8. Upaya Administratif.....	<b>131</b>
9. Data Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan bukti pendukung penerbitan surat keputusan penjatuhan hukuman Pemerintah Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2015.....	<b>149</b>
B. Kendala dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.....	<b>178</b>
1. Kendala dan Hambatan Secara Normatif Yuridis Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap PNS Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.....	<b>178</b>
2. Kendala Teknis Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	<b>181</b>
3. Kendala Lain Yang Tercakup Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.....	<b>187</b>

C. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Mengatasi Pelanggaran Disiplin.....	193
BAB V PENUTUP.....	200
A. Kesimpulan.....	200
B. Saran.....	203



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1</b> Skema Relasi Pemerintah (Bestuur) dan Rakyat (Burger) Dalam Hukum Administrasi.....	<b>50</b>
<b>Bagan 2.5</b> Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....	<b>118</b>
<b>Bagan 3.5</b> Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....	<b>119</b>
<b>Bagan 4</b> Prosedur Pengajuan Keberatan Sebagai Banding Administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.....	<b>140</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.....	<b>74</b>
<b>Tabel 2</b> Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) Untuk PNS Struktural.....	<b>129</b>
<b>Tabel 3</b> Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) untuk Pegawai Negeri Sipil Fungsional.....	<b>130</b>
<b>Tabel 4</b> Pelanggaran Disiplin Tahun 2011.....	<b>149</b>
<b>Tabel 5</b> Pelanggaran Disiplin Tahun 2012.....	<b>154</b>
<b>Tabel 6</b> Pelanggaran Disiplin Tahun 2013.....	<b>158</b>
<b>Tabel 7</b> Pelanggaran Disiplin Tahun 2014.....	<b>165</b>
<b>Tabel 8</b> Pelanggaran Disiplin Tahun 2015.....	<b>174</b>
<b>Tabel 9</b> Perbandingan PPRI Nomor 30 Tahun 1980 dan PPRI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	<b>191</b>

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, penelitian ini menitikberatkan pada peran dan fungsi pembinaan, pengawasan dan sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan penormaam dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan menelaah fungsi dan peran administratif kepegawaian dan fungsi pemerintahan dalam mensejahterakan dan kemakmurkan rakyat sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat. Fokus utama pada penelitian ini yaitu mengkaji konsistensi penerapan sanksi administratif kepegawaian sebagai bentuk pembinaan kepegawaian. Tujuan penelitian ini, ingin mengetahui sejauhmana penerapan sanksi administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Politik Hukum. Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus obyektif sesuai dengan penormaam yang ada; *kedua*, Peran Pengawasan melekat dan pola pembinaan sebagai penunjang pembinaan administratif kepegawaian harus ditingkatkan; *ketiga*, pejabat yang berwenang menghukum memperhitungkan dan mempertimbangkan serta cermat dalam menentukan sanksi penjatuhan hukuman disiplin guna pencapaian hukum yang adil dan bijaksana.

Kata kunci: Sanksi administratif, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah.

## ABSTRACT

This research is entitled “The Implementation of Administrative Sanction towards Civil Servants Who Conduct Indisciplinary Actions in Administrative Environment of Sanggau Regency of West Borneo Province. This research emphasizes on the role and function of Officialdom guidance, monitoring and administrative as the prevailing norms and regulations. It is aimed to analyze officialdom administrative functions and roles based on society principles in prospering and advancing society as the mandate of Pancasila and Constitution of 1945 of the fourth amendment. The main focus of this research is to analyze the consistency of implementation of officialdom administrative sanction as the form of officialdom development. The aim of this research is to find out how far the implementation of administrative sanction in administrative environment of Sanggau Regency as the Regulations is. Method utilized in this research is normative law with Law Politic approach. The analyses of this research are descriptive and qualitative.

Based on the research result, it can be concluded that: *first*, the decision of disciplinary punishment sentence should be objective as the existing norms; second, Monitoring Role is attached to and development as the support of officialdom administrative development should be improved; third, officials who have authority to give punishment count and consider meticulously in determining disciplinary law sanction to reach fair and prudent law achievement.

Keywords: Administrative sanction, discipline, Civil Servants, Local Administration